

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KALUMPANG DALAM KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Fauzan Azmi¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Agus Surya Dharma³,
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: azmi718@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi dinamika efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalumpang Dalam, yang dipicu oleh isu ketidaktepatan sasaran, pola ketergantungan bantuan, serta kurang bijaknya pemanfaatan dana oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis model Miles serta Huberman, penelitian ini melibatkan dua belas informan kunci dari jajaran birokrasi hingga masyarakat akar rumput. Temuan menunjukkan bahwa program ini berada pada kategori cukup efektif; secara signifikan mampu memperluas aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Namun, kendala krusial masih ditemukan pada aspek validasi data yang kurang rutin serta minimnya sosialisasi dari pendamping maupun pemerintah yang berdampak pada rendahnya pemahaman KPM. Sebagai langkah solutif, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi, pemutakhiran data yang lebih progresif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kondisi sosial ekonomi mereka guna memastikan program berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Validasi Data, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

This study explores the dynamics of the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in Kalumpang Dalam Village, which is driven by issues of inaccurate targeting, patterns of aid dependency, and the indiscretion of funds by Beneficiary Families (KPM). Using a descriptive qualitative approach and Miles and Huberman model analysis, this research involved twelve key informants from the bureaucracy to the grassroots. Findings indicate that the program is considered moderately effective; it has significantly expanded accessibility to health and education services while reducing the dropout rate. However, crucial obstacles remain, including irregular data validation and minimal outreach from facilitators and the government, which has resulted in low levels of understanding among KPM. As a solution, strengthened cross-agency coordination, more progressive data updates, and active community participation in reporting their socioeconomic conditions are needed to ensure the program is more accountable and targeted.

Keywords: Program Effectiveness, Data Validation, Community Welfare.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan manifestasi kebijakan perlindungan sosial yang secara yuridis berpijak pada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018. Sebagai skema bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer), PKH didesain bukan sekadar untuk memberikan dukungan finansial jangka pendek, melainkan sebagai investasi strategis dalam modal manusia (human capital). Melalui integrasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, pemerintah berupaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Secara operasional, program ini menysasar keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan harapan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus memicu peningkatan pendapatan produktif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Karakteristik utama yang membedakan PKH dengan bantuan sosial lainnya adalah adanya aspek kontraktual atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. KPM diwajibkan untuk memastikan anggota keluarganya mengakses layanan kesehatan rutin dan menempuh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Hal ini menjadi krusial karena kemiskinan sering kali bersumber dari rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemiskinan tetap menjadi variabel determinan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, PKH diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengintervensi realitas sosial masyarakat yang rentan, agar mereka memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik di masa depan.

Secara statistik, dinamika penerima manfaat PKH di wilayah penelitian menunjukkan tren fluktuatif yang cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah KPM tercatat sebanyak 69 orang, yang kemudian terkoreksi menjadi 66 orang pada tahun 2023, dan mencapai angka 65 orang pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini secara kuantitatif terlihat marginal, fenomena ini mencerminkan adanya proses tata kelola data yang dinamis. Penurunan tersebut dapat diinterpretasikan melalui dua sudut pandang: pertama, adanya keberhasilan "graduasi" di mana kondisi ekonomi KPM telah melampaui ambang batas kemiskinan; atau kedua, hasil dari verifikasi ulang dan validasi data yang lebih ketat guna memastikan bantuan tetap berada pada jalur yang tepat dan meminimalisir adanya exclusion maupun inclusion error.

Sistem penyaluran bantuan PKH yang dilakukan secara triwulanan atau empat kali dalam setahun dirancang untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga miskin. Fleksibilitas nominal bantuan yang disesuaikan dengan komposisi anggota keluarga—mulai dari tingkat Anak TK sebesar Rp750.000 hingga jenjang SMA sebesar Rp475.000—menunjukkan keberpihakan kebijakan terhadap kebutuhan spesifik setiap fase pendidikan. Skema ini bertujuan agar tidak ada lagi alasan bagi keluarga kurang mampu untuk menghentikan sekolah anak-anak mereka karena kendala biaya. Intervensi finansial ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi murni pendidikan di pedesaan, khususnya di Desa Kalumpang Dalam.

Secara sosiologis, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan struktural dalam memenuhi standar hidup minimum yang layak. Oleh karena itu, identifikasi penerima bantuan didasarkan pada kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kriteria tersebut mencakup kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, hingga anak usia sekolah yang berisiko kehilangan akses pendidikan. Struktur tata kelola program ini melibatkan koordinasi lintas sektoral yang kompleks, di mana Kementerian Sosial berperan sebagai pemegang otoritas utama dengan supervisi dari Bappenas, yang kemudian diimplementasikan di tingkat tapak oleh Dinas Sosial. Koordinasi ini dimaksudkan agar bantuan yang bersifat multisektoral ini tetap terkontrol dan transparan.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan diskrepansi antara idealisme regulasi dengan implementasi praktis. Berdasarkan observasi dan dokumentasi di Desa Kalumpang Dalam, peneliti menemukan bahwa prinsip pengelolaan program belum sepenuhnya selaras dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Masalah mendasar yang mencuat ke permukaan adalah persoalan akurasi sasaran. Meskipun data tahun 2025 mencatat 66 penerima aktif, ditemukan indikasi bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya presisi. Keberadaan individu yang secara ekonomi dianggap mampu namun tetap terdaftar sebagai penerima bantuan menciptakan ketimpangan sosial dan mencederai rasa keadilan bagi warga lain yang jauh lebih membutuhkan.

Permasalahan ketepatan sasaran ini berkaitan erat dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III mengenai sumber daya dan komunikasi data. Kegagalan dalam melakukan pemutakhiran data yang faktual menyebabkan bantuan mengalir ke pihak yang tidak seharusnya (inclusion error). Hal ini merusak efektivitas program karena sumber daya finansial yang terbatas

seharusnya dialokasikan secara eksklusif bagi masyarakat yang benar-benar berada di bawah garis kemiskinan. Tanpa adanya transparansi dalam proses seleksi KPM di tingkat desa, efektivitas PKH dalam menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Babirik akan sulit mencapai hasil optimal, mengingat anggaran negara terbuang untuk kelompok yang sudah mandiri.

Fenomena lain yang menjadi tantangan berat adalah munculnya mentalitas ketergantungan di kalangan masyarakat penerima manfaat. Alih-alih dijadikan modal untuk memulai usaha produktif atau meningkatkan taraf hidup secara mandiri, bantuan tunai ini sering kali dianggap sebagai pendapatan tetap yang bersifat pasif. Kondisi ini secara perlahan mengikis etos kerja masyarakat dan menghambat kemandirian ekonomi. Jika bantuan sosial tidak dibarengi dengan pemberdayaan dan pendampingan yang intensif, KPM akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang nyaman, di mana mereka merasa lebih untung tetap berada dalam status "miskin" agar bantuan terus mengalir, daripada berusaha untuk keluar dari status tersebut.

Selain masalah mentalitas kerja, penyalahgunaan peruntukan dana bantuan menjadi catatan kritis bagi keberlangsungan PKH. Esensi bantuan yang seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan gizi anak sekolah, biaya transportasi pendidikan, atau layanan kesehatan dasar, dalam praktiknya sering kali dialihkan untuk kebutuhan konsumtif yang tidak relevan. Ketidakbijakan KPM dalam mengelola dana bantuan menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan edukasi dari pendamping PKH di lapangan. Tanpa literasi keuangan yang baik, bantuan tunai hanya akan memberikan dampak sesaat bagi daya beli, namun gagal dalam meningkatkan indikator kesejahteraan jangka panjang seperti perbaikan kesehatan dan prestasi akademik anak.

Sebagai simpulan, efektivitas PKH di Desa Kalumpang Dalam masih menghadapi hambatan struktural dan perilaku yang signifikan. Untuk mengembalikan program ke jalur yang tepat, diperlukan reformasi sistem pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam memantau kelayakan penerima. Selain itu, sinkronisasi data antar instansi harus dilakukan secara berkala untuk meminimalisir manipulasi informasi. Program Keluarga Harapan harus dipandang sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan sebagai sandaran abadi. Diperlukan penguatan peran pendamping sosial untuk memberikan edukasi berkelanjutan agar masyarakat mampu mengelola bantuan secara bijak dan memiliki motivasi yang kuat untuk segera bergraduasi dari status kemiskinan.

Efektivitas secara fundamental merujuk pada tingkat keberhasilan suatu entitas dalam merealisasikan tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hery (2018), efektivitas mencerminkan kemampuan organisasi untuk melakukan tindakan yang tepat guna mencapai sasaran akhir. Senada dengan hal tersebut, Hani Handoko (dalam Uha, 2015) menekankan bahwa indikator utama efektivitas terletak pada kekuatan korelasi antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi hasil kerja terhadap visi organisasi, maka program tersebut dapat dikategorikan semakin efektif. Berbagai pakar seperti Sinambela (2016) dan Sudiro (2018) sepakat bahwa efektivitas adalah standar prestasi dalam pencapaian kesejahteraan tujuan melalui proses yang terencana secara sistematis.

Dalam konteks pelayanan publik, Pasalong (2017) dan Handayaningrat (dalam Heri, 2020) mengartikan efektivitas sebagai pengukuran atas ketercapaian target melalui serangkaian proses kegiatan yang terukur. Lebih jauh lagi, Devas (dalam Pohan, 2021) mengaitkan efektivitas dengan efisiensi waktu dan biaya dalam tata kelola keuangan daerah, di mana program pemerintah harus memberikan hasil guna maksimal dengan sumber daya yang serendah mungkin. Hal ini selaras dengan pandangan Robbins (dalam Pohan, 2021) bahwa efektivitas organisasi merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh interaksi antara individu, kelompok, dan struktur organisasi. Oleh karena itu, Mardiasmo (dalam Sari, 2020) menyimpulkan bahwa kegiatan operasional baru dapat dikatakan efektif apabila seluruh prosesnya benar-benar berujung pada pencapaian hasil guna bagi target kebijakan.

Untuk membedah efektivitas secara mendalam, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Budiani (dalam Pratiwi & Nurcahyanto, 2017) merinci empat pilar utama dalam mengukur efektivitas, yaitu ketepatan sasaran, intensitas sosialisasi, pemahaman tujuan, serta kualitas pemantauan program. Pendekatan sasaran (goals approach) memusatkan perhatian pada

aspek output untuk mengukur sejauh mana realisasi target dibandingkan dengan rencana awal. Selain itu, terdapat pendekatan sumber (resource approach) yang melihat efektivitas dari kemampuan organisasi dalam memperoleh dan mengelola sumber daya langka dari lingkungannya. Terakhir, pendekatan proses (process approach) menitikberatkan pada kesehatan internal organisasi dan koordinasi antarbagian sebagai tolak ukur efisiensi operasional.

Dalam melakukan evaluasi atas efektivitas, Fathor Rasyid (2022) mengidentifikasi lima metode strategis. Pertama, pendekatan eksperimental yang mengisolasi dampak program secara saintifik. Kedua, pendekatan berorientasi tujuan yang menggunakan kriteria keberhasilan berdasarkan desain pengembangan awal. Ketiga, pendekatan fokus keputusan yang menyediakan informasi sistematis bagi pengelola. Keempat, pendekatan berorientasi pemakai yang menekankan utilitas informasi bagi pemangku kepentingan. Kelima, pendekatan responsif yang bersifat holistik dengan merangkul berbagai sudut pandang dari semua pihak yang terlibat (stakeholders). Keseluruhan pendekatan ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap tindakan organisasi memberikan dampak yang diinginkan tanpa mengecewakan ekspektasi publik.

Pengukuran efektivitas memerlukan indikator yang konkret karena sifatnya yang subjektif tergantung sudut pandang pengevaluasi. Steers (dalam Setiawan et al., 2022) merumuskan lima kriteria krusial: produktivitas, fleksibilitas adaptasi, kepuasan kerja, kemampuan meraih nilai tambah, serta penguasaan sumber daya. Duncan (dalam Pohan, 2021) menyederhanakannya menjadi tiga pilar utama, yakni pencapaian tujuan melalui periodisasi yang jelas, integrasi melalui sosialisasi dan komunikasi antarorganisasi, serta adaptasi terhadap dinamika lingkungan internal maupun eksternal. James L. Gibson (dalam Ilham, 2022) menambahkan bahwa efektivitas juga sangat bergantung pada kejelasan strategi, kematangan perencanaan, serta ketersediaan sarana pendukung dan sistem pengawasan yang edukatif.

Selain kriteria pengukuran, terdapat faktor-faktor lingkungan dan internal yang secara signifikan mempengaruhi hasil akhir kebijakan. Richard M. Steers (dalam Feronica, 2021) menjelaskan bahwa karakteristik organisasi yang mencakup struktur dan teknologi menentukan pola interaksi kerja. Karakteristik lingkungan, seperti kondisi kerja dan hubungan antarpegawai, juga memberikan pengaruh melalui proses dinamisasi. Faktor paling vital adalah karakteristik pekerja, di mana perilaku individu secara langsung menentukan kelancaran pencapaian tujuan. Terakhir, praktik manajemen yang mencakup gaya kepemimpinan dan kebijakan pengambilan keputusan harus mampu menyelaraskan teknologi dengan unsur manusia agar organisasi tetap adaptif terhadap perubahan global yang rumit.

Kemiskinan tetap menjadi persoalan fundamental yang memerlukan penanganan sistematis dan multidimensional. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan per kapita sebagaimana didefinisikan oleh World Bank, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Amartya Sen memaknai kemiskinan sebagai "deprivasi kemampuan" (capability deprivation), di mana individu kehilangan kebebasan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini mencakup kemiskinan ekonomi (daya beli), pendidikan (kualitas SDM), kesehatan (akses gizi), sosial (keterpinggiran), hingga kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok marjinal. Penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada pemberdayaan potensi diri agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran ketidakberdayaan.

Sebagai respon terhadap kompleksitas kemiskinan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007. PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas modal manusia pada keluarga miskin. Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018, program ini memiliki tujuan ganda: memberikan perlindungan sosial jangka pendek melalui bantuan tunai, serta memutus rantai kemiskinan jangka panjang melalui prasyarat pendidikan dan kesehatan. Dengan mewajibkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menyekolahkan anak dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, PKH mendorong terciptanya generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif, sehingga mampu keluar dari jerat kemiskinan yang diwariskan secara

turun-temurun.

Tujuan mendalam dari PKH mencakup pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan aksesibilitas kelompok rentan terhadap sistem perlindungan negara. Mega Nugraha (2024) menjelaskan bahwa PKH memberikan insentif yang memaksa perubahan perilaku positif pada masyarakat, seperti prioritas pada gizi ibu hamil dan pencegahan stunting pada balita. Selain itu, program ini berupaya menciptakan kemandirian ekonomi keluarga melalui pendampingan sosial dan edukasi pengelolaan keuangan. Dengan terjaminnya hak dasar bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, PKH merefleksikan implementasi sila kelima Pancasila dan amanat UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Keberhasilan PKH pada akhirnya diukur dari sejauh mana keluarga penerima mampu bertransformasi menjadi keluarga yang mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah di masa depan.

Secara komprehensif, efektivitas PKH dapat dinilai melalui ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan berkelanjutan sebagaimana teori Budiani. Integrasi antara perencanaan yang matang, sosialisasi yang masif, dan pemantauan yang ketat menjadi kunci utama. Jika PKH mampu meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan sekaligus menurunkan angka beban pengeluaran keluarga miskin, maka program ini telah mencapai derajat efektivitas yang diharapkan. Sinergi antara karakteristik organisasi pemerintah yang responsif dengan karakteristik KPM yang kooperatif akan menentukan apakah PKH benar-benar menjadi katalisator bagi keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

METODE

Penelitian ini mengambil lokus pada tata kelola pemerintahan tingkat desa, tepatnya di Kantor Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki dinamika sosial yang relevan dengan implementasi kebijakan bantuan sosial. Secara administratif, kantor desa tersebut beralamat di Jalan Titian Panjang, RT 3, RW 1, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan kode pos 71545. Penentuan lokasi yang spesifik ini bertujuan agar peneliti dapat menangkap fenomena sosiologis secara langsung di tengah masyarakat yang menjadi target sasaran Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan berada langsung di jantung kegiatan administratif desa, peneliti berharap dapat mengamati interaksi antara aparatur desa dengan keluarga penerima manfaat secara natural.

Dalam mengkaji fenomena ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada perolehan data deskriptif berupa narasi tertulis maupun lisan serta perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan pandangan Dancin (dalam Anggito, 2018), penelitian kualitatif beroperasi pada latar alamiah untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi melalui berbagai metodologi yang holistik. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali secara mendalam dan terperinci mengenai bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dikelola di Desa Kalumpang Dalam. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mencari data statistik, tetapi berusaha memahami realitas sosial, perasaan, dan pengalaman para informan terkait kebijakan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Tipe penelitian yang diadopsi adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan potret utuh mengenai situasi yang sedang diteliti sesuai dengan fakta objektif di lapangan. Merujuk pada pemikiran Sugiyono (2021: 29), metode deskriptif berfungsi untuk menganalisis hasil penelitian tanpa bermaksud menghasilkan generalisasi yang luas, melainkan lebih fokus pada pengungkapan fakta dan keadaan saat penelitian berlangsung. Peneliti berusaha menuturkan data secara transparan mengenai efektivitas PKH, sehingga gambaran mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipahami secara komprehensif. Fokus utama dari tipe penelitian ini adalah memberikan interpretasi yang tajam terhadap hubungan antara variabel-variabel yang muncul selama proses observasi dan wawancara di lokasi studi.

Keberhasilan analisis dalam penelitian ini sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan, yang dikategorikan menjadi data primer dan sekunder. Data primer merupakan

informasi utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi intensif dengan informan yang memiliki otoritas dan pengalaman terkait PKH di Desa Kalumpang Dalam. Sementara itu, data sekunder berperan sebagai pendukung dan pelengkap yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, laporan administrasi desa, serta literatur lain yang relevan. Sinergi antara kedua jenis data ini sangat krusial untuk menghasilkan temuan yang kredibel mengenai efektivitas program dalam meningkatkan kualitas hidup warga di Kecamatan Babirik.

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan subjek penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memilih informan berdasarkan kriteria spesifik yang dianggap paling memahami permasalahan yang diteliti. Pemilihan didasarkan pada sifat atau ciri tertentu dari populasi yang telah diketahui sebelumnya, sehingga informasi yang dihasilkan lebih relevan dan mendalam. Penarikan informan dilakukan hingga mencapai titik jenuh, yaitu kondisi di mana tidak ditemukan lagi variasi informasi baru dari subjek yang diwawancarai. Dalam konteks ini, informan dipilih dari jajaran birokrasi Dinas Sosial, pendamping program, perangkat desa, hingga masyarakat penerima manfaat langsung.

Penelitian ini melibatkan 12 orang informan kunci yang merepresentasikan berbagai perspektif kepentingan. Di tingkat kebijakan, peneliti mewawancarai Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendapatkan data makro. Di tingkat operasional, Pendamping PKH dan Kepala Desa Kalumpang Dalam dilibatkan untuk memahami teknis pelaksanaan di lapangan. Selain itu, sembilan orang warga penerima manfaat PKH, seperti Ibu Pahriah hingga Ibu Muliatur Nisa, memberikan testimoni langsung mengenai dampak program terhadap kesejahteraan keluarga mereka. Keragaman latar belakang informan ini sangat penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh tidak bias dan mencakup seluruh aspek ekosistem kebijakan PKH.

Guna menjaga arah penelitian agar tetap sistematis, peneliti menyusun desain operasional yang mengacu pada teori efektivitas menurut Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017). Terdapat empat indikator utama yang dijadikan tolok ukur, yaitu: (1) Ketepatan sasaran yang mencakup pencapaian target dan kepuasan penerima; (2) Sosialisasi program yang meliputi pemahaman masyarakat dan prosedur yang dijalankan; (3) Pencapaian tujuan program melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; serta (4) Pemantauan program untuk melihat peningkatan kapasitas masyarakat. Desain operasional ini berfungsi sebagai instrumen untuk membedah masalah secara objektif sehingga evaluasi terhadap PKH di Desa Kalumpang Dalam memiliki landasan teoretis yang kuat.

Langkah strategis dalam penelitian ini diwujudkan melalui teknik pengumpulan data yang beragam guna memenuhi standar validitas ilmiah. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015: 62), teknik pengumpulan data adalah inti dari proses penelitian. Peneliti menerapkan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali perspektif subjek secara tatap muka, sebagaimana disarankan oleh Agustino (2020: 216). Selain itu, teknik observasi digunakan oleh peneliti (Emzir, 2016) untuk mencatat fenomena yang berlangsung secara langsung di lokasi. Terakhir, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti fisik, gambar, dan tulisan yang dapat melegitimasi temuan di lapangan serta memberikan konteks sejarah dan administratif terhadap data yang ada.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan mengacu pada model Miles dan Huberman (dalam Priyatna, 2021: 9). Tahapan pertama adalah reduksi data, di mana peneliti menyortir, memfokuskan, dan merangkum data mentah dari lapangan menjadi informasi yang lebih sistematis. Tahapan kedua adalah penyajian data (*data display*) yang diwujudkan dalam bentuk teks naratif untuk memberikan gambaran keseluruhan fenomena. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dan klasifikasi, di mana peneliti mulai mencari makna dari pola-pola yang muncul sejak awal penelitian. Ketiga proses ini berjalan secara simultan hingga data mencapai titik jenuh dan kesimpulan akhir yang sah dapat dirumuskan.

Untuk menjamin kebenaran temuan, peneliti melakukan uji kredibilitas sebagaimana dipaparkan oleh Sugiyono (2018: 270). Metode pertama adalah perpanjangan pengamatan untuk membangun kedekatan dan kepercayaan dengan informan sehingga tidak ada data yang

disembunyikan. Metode kedua adalah triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber (mengecek data ke berbagai pihak), triangulasi teknik (menggunakan metode berbeda untuk sumber yang sama), dan triangulasi waktu (melakukan observasi pada situasi yang berbeda). Selain itu, peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat dan menggunakan bahan referensi pendukung seperti foto dan dokumen autentik. Seluruh rangkaian uji ini memastikan bahwa hasil penelitian mengenai PKH di Desa Kalumpang Dalam dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Ketepatan Sasaran Program

a. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran merupakan sebuah indikator krusial yang merepresentasikan keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, serta target strategis yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan berbagai komponen program secara optimal. Dalam konteks pelayanan di Desa Kalumpang Dalam, hasil observasi lapangan dan dialog langsung dengan warga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program tersebut masih jauh dari harapan. Ketidakselarasan antara perencanaan program dengan realisasi kebutuhan di tingkat akar rumput menyebabkan hasil yang dicapai belum mampu memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Analisis ini diperkuat dengan merujuk pada teori efektivitas yang dikembangkan oleh Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3), yang menempatkan indikator pencapaian sasaran sebagai elemen kunci keberhasilan sebuah program sosial. Berdasarkan perspektif teoretis tersebut, ketidakmampuan program dalam menjangkau penerima manfaat yang tepat di Desa Kalumpang Dalam mengindikasikan adanya celah antara perencanaan dan realitas eksekusi. Kondisi ini mencerminkan bahwa performa PKH di wilayah tersebut belum memenuhi standar efektivitas, mengingat masih terdapat diskrepansi dalam penentuan kualifikasi penerima bantuan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap mekanisme pemutakhiran data dan proses seleksi menjadi sangat mendesak agar sasaran program dapat diwujudkan secara lebih presisi.

b. Kepuasan Terhadap Program

Partisipasi aktif masyarakat dalam sebuah program pembangunan sangat bergantung pada aksesibilitas informasi yang mereka terima. Pengetahuan yang memadai mengenai manfaat dan tujuan program, khususnya pada inisiatif seperti Posyandu Remaja, menjadi fondasi utama agar kelompok sasaran merasa terlibat. Namun, temuan di lapangan melalui wawancara dan observasi menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang signifikan. Para remaja belum mendapatkan penjelasan komprehensif dari petugas kesehatan maupun pemerintah desa, ditambah dengan ketiadaan media informasi visual seperti spanduk atau brosur di kantor desa sebagai sarana sosialisasi mandiri bagi warga.

Kondisi ini bertolak belakang dengan teori partisipasi yang dikemukakan Slamet (dalam Theresia dkk., 2015), yang menegaskan bahwa ketersediaan informasi adalah syarat mutlak bagi tumbuhnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa pengetahuan yang jelas, ruang untuk berkontribusi bagi kaum muda menjadi tertutup. Akibatnya, keterbatasan informasi di desa tersebut menghambat keberhasilan program Posyandu Remaja karena calon peserta tidak memahami urgensi serta nilai strategis dari kegiatan tersebut bagi kesehatan mereka.

2. Sosialisasi Program

a. Pemahaman Program

Tingkat pemahaman terhadap sebuah program menjadi tolok ukur fundamental dalam menilai apakah serangkaian kegiatan yang telah dijalankan mampu merealisasikan target-target awalnya. Secara esensial, keberhasilan suatu inisiatif publik sangat bergantung pada seberapa efektif tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan di lapangan. Namun, temuan melalui wawancara mendalam dan observasi di Desa Kalumpang Dalam mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) masih tergolong rendah. Ketidaktahuan ini mencerminkan adanya hambatan dalam penyampaian informasi, sehingga masyarakat belum sepenuhnya menyerap tujuan dan manfaat dari kehadiran program tersebut bagi kesejahteraan mereka.

Jika ditinjau melalui perspektif teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani, efektivitas sebuah program sangat ditentukan oleh sejauh mana para sasaran program mengerti dan memahami mekanisme pelaksanaannya. Dalam konteks PKH di Desa Kalumpang Dalam, indikator pemahaman ini menunjukkan hasil yang belum optimal, di mana ketidaktahuan warga menjadi faktor penghambat utama tercapainya efektivitas program secara menyeluruh. Hal ini mempertegas bahwa tanpa pemahaman yang kuat dari sisi penerima manfaat, program sosial yang dirancang dengan baik sekalipun akan sulit mencapai kinerja maksimal sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka teori maupun tujuan awal kebijakan tersebut.

b. Prosedur

Secara konseptual, prosedur merupakan serangkaian tahapan sistematis yang dirancang untuk menuntaskan suatu aktivitas, atau sering disebut sebagai pedoman langkah demi langkah yang wajib dipatuhi sebelum menjalankan sebuah pekerjaan. Dalam konteks pelayanan di tingkat lokal, hasil pengamatan lapangan dan dialog mendalam dengan para pemangku kepentingan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat serta aparatur di Desa Kalumpang Dalam terhadap mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) tergolong cukup memadai. Alur birokrasi dan teknis penyaluran bantuan telah dipahami dengan baik, sehingga proses pelaksanaan kegiatan di desa tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa hambatan prosedural yang berarti. Kelancaran ini mencerminkan adanya komunikasi yang berjalan baik antara pendamping program dengan para penerima manfaat.

Jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani, keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh sejauh mana sasaran memahami aturan main yang ditetapkan. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa indikator pemahaman prosedur PKH di Desa Kalumpang Dalam telah mencapai kategori efektif. Hal ini selaras dengan argumen Pratiwi dan Nurcahyanto (2017) yang menekankan bahwa sosialisasi tata cara yang tepat merupakan kunci utama keberhasilan program sosial. Efektivitas ini membuktikan bahwa edukasi mengenai kriteria penerima, jadwal pencairan, hingga kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah tersampaikan secara akurat, sehingga meminimalisir terjadinya konflik atau kebingungan administratif di tingkat desa.

3. Tujuan Program

a. Akses Pendidikan

Fokus utama Program Keluarga Harapan (PKH) dalam sektor pendidikan ditujukan bagi ibu rumah tangga yang memiliki anak pada jenjang SD, SMP, hingga SMA. Melalui skema ini, alokasi dana bantuan disalurkan secara spesifik guna memenuhi kebutuhan operasional pendidikan sesuai dengan komponen masing-masing anak. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi di lapangan, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat serta pemanfaatan dana bantuan di Desa Kalumpang Dalam telah berjalan dengan

optimal. Masyarakat penerima manfaat cenderung menggunakan dana tersebut secara tepat sasaran untuk mendukung keberlanjutan proses belajar mengajar anak-anak mereka.

Jika ditinjau melalui kerangka teoretis efektivitas menurut Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3), pencapaian indikator akses pendidikan dalam program ini menunjukkan performa yang signifikan. Keberhasilan penyaluran bantuan di Desa Kalumpang Dalam dapat dikategorikan sebagai program yang efektif, karena mampu memfasilitasi kemudahan akses bagi siswa dari keluarga prasejahtera untuk tetap bersekolah. Sinergi antara ketepatan sasaran bantuan dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan di desa tersebut membuktikan bahwa PKH telah menjalankan fungsinya dalam memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

b. Akses Kesehatan

Fokus utama akses kesehatan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan bagi kelompok prioritas, yakni ibu hamil dan anak usia dini pada rentang usia 0 hingga 6 tahun. Skema ini memastikan bahwa alokasi dana yang disalurkan benar-benar menyorot komponen kesehatan yang spesifik sesuai kebutuhan tiap anggota keluarga. Berdasarkan temuan di lapangan melalui teknik wawancara dan pengamatan langsung, implementasi PKH di Desa Kalumpang Dalam telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masyarakat setempat menyatakan kepuasan mereka terhadap keberlangsungan program ini, yang dinilai telah memberikan dampak positif dan kemudahan akses dalam layanan kesehatan bagi warga prasejahtera.

Merujuk pada parameter efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017:3), keberhasilan sebuah program dapat diukur dari sejauh mana tujuan dan sasarannya tercapai secara nyata. Dalam konteks akses kesehatan di Desa Kalumpang Dalam, indikator efektivitas tersebut telah terpenuhi dengan baik. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran serta tingginya tingkat kepuasan penerima manfaat menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berhasil secara fungsional di tingkat desa. Hal ini membuktikan bahwa intervensi sosial melalui PKH telah menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di wilayah tersebut.

c. Kesejahteraan Sosial

Fokus utama komponen kesejahteraan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan bagi penyandang disabilitas serta kelompok lanjut usia di atas 70 tahun. Melalui skema ini, bantuan dana didistribusikan secara spesifik guna memenuhi kebutuhan dasar masing-masing kelompok sasaran tersebut. Temuan di lapangan, yang dihimpun melalui teknik wawancara dan observasi, menunjukkan tingkat kepuasan yang signifikan dari masyarakat Desa Kalumpang Dalam. Secara umum, implementasi program ini telah berjalan dengan sangat positif, di mana bantuan yang diberikan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan para penerima manfaat di desa tersebut.

Keberhasilan ini selaras dengan perspektif teoretis Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017), yang menekankan bahwa efektivitas sebuah program diukur dari keberhasilannya dalam mencapai target-target yang telah dicanangkan. Dalam konteks bidang kesejahteraan sosial, indikator keberhasilan terlihat jelas pada terpenuhinya kebutuhan hidup esensial bagi warga lansia dan penyandang disabilitas. Karena tujuan dari komponen kesejahteraan sosial ini telah terealisasi dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang konkret bagi masyarakat Desa Kalumpang Dalam, maka program PKH pada wilayah ini dapat dikategorikan sebagai program yang sudah berjalan secara efektif dan berdaya guna.

4. Pemantauan Program

a. Peningkatan Kemampuan

Peningkatan kapasitas atau kemampuan pada dasarnya merupakan tolok ukur utama keberhasilan setelah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan akses bantuan di sektor pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial. Inti dari proses ini adalah adanya transformasi perilaku yang terstruktur, di mana bantuan yang diterima menjadi stimulan bagi keluarga untuk mandiri dan berkembang sesuai dengan komponen bantuan masing-masing. Berdasarkan temuan melalui sesi wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, masyarakat di Desa Kalumpang Dalam mengekspresikan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini mengindikasikan bahwa proses edukasi dan pemberdayaan yang dijalankan telah berhasil menyentuh aspek fundamental perubahan perilaku pada keluarga sasaran.

Jika ditinjau melalui perspektif teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani, pencapaian di Desa Kalumpang Dalam telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Teori tersebut menekankan bahwa efektivitas diukur dari sejauh mana sasaran program mampu meningkatkan kapabilitasnya secara nyata. Dalam konteks PKH di wilayah tersebut, indikator peningkatan kemampuan menunjukkan hasil yang positif dan berjalan sesuai dengan koridor tujuan program. Keselarasan antara pelaksanaan di lapangan dengan teori efektivitas ini membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk PKH telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat kemandirian masyarakat desa melalui perubahan pola pikir dan tindakan yang lebih produktif.

b. Manfaat Program

Esensi dari Program Keluarga Harapan (PKH) terletak pada kemampuannya untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam upaya memutus siklus kemiskinan yang bersifat struktural. Melalui inisiatif ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mentransformasi pola pikir keluarga prasejahtera agar lebih mandiri dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Berdasarkan hasil studi lapangan yang mencakup wawancara mendalam dan observasi di Desa Kalumpang Dalam, ditemukan bahwa masyarakat merasakan kepuasan yang signifikan terhadap pelaksanaan program ini. Proses peningkatan kapasitas warga dinilai telah berjalan secara optimal dan menunjukkan keberhasilan dalam memberikan bekal keterampilan serta pengetahuan baru bagi keluarga penerima manfaat.

Pencapaian efektivitas ini sejalan dengan kerangka teoretis yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017), yang menekankan pentingnya indikator peningkatan kemampuan sebagai parameter keberhasilan sebuah program. Dalam konteks di Desa Kalumpang Dalam, indikator tersebut menunjukkan hasil yang positif, di mana PKH tidak sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga berhasil mengedukasi warga secara efektif. Keberhasilan ini membuktikan bahwa mekanisme intervensi yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran strategis program, sehingga mampu menciptakan perubahan perilaku yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat lokal secara berkelanjutan.

B. Faktor-faktor Penghambat dan pendukung Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Kalumpang Dalam Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya Agen Penyaluran Dana Bantuan PKH di Desa
- b. Peran Pendamping PKH Desa

2. Faktor Penghambat

- c. Ketepatan Sasaran Program
- d. Keterbatasan Informasi mengenai Bantuan PKH

SIMPULAN

Evaluasi mendalam mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kalumpang Dalam, Kecamatan Babirik, menunjukkan bahwa intervensi sosial ini telah mencapai derajat keberhasilan yang signifikan dan berada pada kategori cukup memuaskan. Keberhasilan ini terpotret jelas dari tiga pilar utama, yakni prosedur sosialisasi, pencapaian target sektoral, dan mekanisme pengawasan. Dari aspek prosedural, pemerintah desa dan instansi terkait telah menunjukkan dedikasi yang kuat dalam mendiseminasikan aturan main program secara transparan. Masyarakat tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga memahami struktur mekanisme dan persyaratan administratif yang menyertainya, yang pada gilirannya menciptakan alur komunikasi yang relatif lancar antara birokrasi dan penerima manfaat. Secara substansial, program ini telah bertransformasi menjadi katalisator dalam memperluas aksesibilitas terhadap layanan dasar, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Di ranah edukasi, PKH berperan sebagai "katup penyelamat" finansial yang mereduksi angka putus sekolah melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa dari keluarga pra-sejahtera, sehingga investasi sumber daya manusia jangka panjang dapat terus terjaga. Senada dengan hal tersebut, pada sektor kesehatan, terdapat pergeseran paradigma perilaku masyarakat yang kini lebih proaktif dalam memanfaatkan fasilitas medis untuk pemeriksaan ibu dan anak serta pemenuhan nutrisi esensial. Secara akumulatif, bantuan ini tidak hanya meringankan beban pengeluaran domestik rumah tangga yang rentan, tetapi juga menumbuhkan rasa aman sosial (*social security*) yang meningkatkan resiliensi ekonomi keluarga penerima manfaat dalam menghadapi fluktuasi biaya hidup di pedesaan.

Namun, di balik capaian positif tersebut, efektivitas program ini masih dibayangi oleh tantangan struktural yang berpotensi mendegradasi kualitas keadilan sosial di lapangan, terutama terkait akurasi basis data dan asimetri informasi. Fenomena ketidaktepatan sasaran tetap menjadi residu permasalahan yang serius; adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan realitas ekonomi warga menyebabkan distribusi bantuan sering kali terjebak dalam masalah inklusi dan eksklusi (*inclusion and exclusion errors*). Kondisi di mana warga yang memenuhi kriteria terlewatkan sementara warga yang sudah mampu tetap terdata, menciptakan riak ketidakpuasan sosial yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integritas program pemerintah. Masalah ini diperparah oleh keterbatasan jangkauan informasi yang bersifat menyeluruh. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki persepsi parsial, di mana mereka memandang PKH semata-mata sebagai bantuan dana hibah tunai tanpa menyadari adanya kewajiban kondisional (*conditional cash transfer*) di bidang kesehatan dan pendidikan. Disparitas pemahaman ini merupakan dampak dari metode sosialisasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara mendalam, serta penggunaan bahasa birokrasi yang sering kali sulit dicerna oleh warga dengan tingkat literasi yang bervariasi. Ketidakjelasan mengenai skema pencairan dana, fluktuasi jumlah bantuan, dan prosedur administrasi yang dinamis sering kali memicu kesalahpahaman kolektif. Oleh sebab itu, efektivitas PKH di masa depan sangat bergantung pada reformasi validasi data yang lebih dinamis serta penguatan strategi komunikasi publik yang lebih humanis dan mudah diakses, agar program ini tidak hanya menjadi bantuan finansial sesaat, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Pratiwi, M. R., & Nurcahyanto, H. (2017). Implementasi Kebijakan Kualitas Pelayanan Publik di Fenomena Administrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(3), 1-10.

Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta:

Salemba Humanika



Hardani, ddk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.

Monica Feronica, (2021), *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*, (2021:139